

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPKP telah menjalankan fungsi pengawasan di OPD Kota Kupang melalui audit, reviu, konsultatif, edukatif, dan preventif secara terpadu. Audit dan reviu berbasis risiko memungkinkan deteksi potensi penyimpangan dan evaluasi kepatuhan, efektivitas, efisiensi, serta keandalan laporan keuangan. Fungsi konsultatif melalui pendampingan SPIP dan manajemen risiko membantu OPD memperkuat pengendalian internal, menyusun SOP, serta meningkatkan maturitas pengelolaan risiko. Fungsi edukatif berupa sosialisasi anti-korupsi dan edukasi pencegahan fraud membentuk budaya kerja yang sadar risiko dan akuntabel. Sementara itu, fungsi preventif melalui audit berbasis risiko, early warning, klarifikasi dini, dan pemantauan berkala mencegah terjadinya fraud serta memastikan tindak lanjut rekomendasi dijalankan. Namun Masi Menghadapi Berbagai Kendala. Kendala utama pengawasan dan penerapan SPIP di OPD Kota Kupang meliputi keterbatasan SDM yang belum merata kompetensinya, jumlah auditor yang terbatas, dokumen dan data OPD yang belum lengkap atau terarsip rapi, serta variasi komitmen pimpinan OPD yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Selain itu, tindak lanjut atas temuan BPKP belum optimal, dan mutasi pegawai yang tinggi menghambat penerapan SPIP terintegrasi secara berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang dan OPD

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan komitmen pimpinan OPD dalam menerapkan SPIP dan manajemen risiko secara konsisten. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan Akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian intern perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan data dan dokumen keuangan OPD perlu ditata secara lebih sistematis dan terintegrasi.

2. Bagi BPKP Perwakilan Provinsi Ntt

BPKP diharapkan terus memperkuat pendekatan audit berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi informasi serta data analytics dalam mendeteksi potensi *fraud*. Selain itu, peran pembinaan dan konsultasi SPIP perlu terus ditingkatkan agar OPD mampu membangun pengendalian intern yang efektif dan berkelanjutan.

3. Bagi Inspektorat Daerah

Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan sinergi dengan BPKP dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, sehingga perbaikan tata kelola keuangan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, BPKP seperti komitmen pimpinan OPD, budaya organisasi, dan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, penggunaan pendekatan metode kuantitatif dengan dukungan data sekunder, seperti hasil temuan audit atau indeks maturitas SPIP, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur mengenai efektivitas pencegahan fraud di sektor pemerintahan daerah.